

Kemunduran Demokrasi di Indonesia dan Gerakan untuk “*Back to Nature*” Menurut Perspektif Rousseau

Petrus Dori¹, Fransiskus Bala Kleden², Ferdinandus Jehalut³

¹Ilmu Pendidikan, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Flores, Indonesia

²Magister Teologi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Flores, Indonesia

³Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: petrusdori27@gmail.com¹, franokleden@gmail.com²,

ferdinandus.jehalut@staf.undana.ac.id³



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Submission: 19-12-2024

Accepted: 09-05-2025

Publish: 15-06-2025

Abstrak

Patut disadari bahwa bangsa Indonesia sedang berada dalam situasi kemunduran demokrasi. Indeks demokrasi di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kemunduran demokrasi ini dapat ditinjau dari dua fakta yang terjadi, yakni, pertama, melemahnya kritik masyarakat sipil di ruang publik, dan kedua, fungsi pemerintahan yang cenderung menyangkal legitimasi lawan karena ingin mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi gagasan “*Back to Nature*” Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dalam konteks demokrasi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa gagasan “*Back to Nature*” Rousseau merupakan sebuah panduan yang baik bagi bangsa Indonesia dalam mengembalikan marwah demokrasi bangsa. Demokrasi Indonesia harus “*Back to Nature*”. Ini bukan berarti bangsa Indonesia harus kembali ke zaman primitif. “*Back to Nature*” berarti kembali kepada makna demokrasi yang autentik. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk sebuah persekutuan atau koalisi pro-demokrasi yang solid. Gerakan persekutuan ini harus dilakukan dalam arena politik, intitusi dan sosial sekaligus. Demokrasi Indonesia akan kembali pada keadaan asalnya dan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan kembali apabila ketiga elemen bangsa ini dapat bekerjasama membangun demokrasi dan merepresi otoritarianisme dalam tubuh demokrasi bangsa.

Kata Kunci: demokrasi; rousseau; *back to nature*; indonesia

Abstract

It should be realized that Indonesian is in a situation of democratic decline. The democracy index in Indonesia continues to decline every year. This decline can be seen from two facts, which are, first, the weakening of civil society criticism in the public sphere, and second, the function of government which tends to deny the legitimacy of opponents because it wants to maintain power. This research aims to examine the relevance of Jean Jacques Rousseau’s “*Back to Nature*” ideas in the context of democracy in Indonesia. This article used a qualitative-descriptive method with a literature study approach. Based on the research results, it was found that Rousseau’s “*Back to Nature*” idea was a good guide for the Indonesian citizens in restoring the nation’s democratic spirit. Indonesian democracy must “*Back to Nature*”. This does not mean that Indonesian citizens have to return to primitive times. “*Back to Nature*” means returning to the authentic meaning of democracy. This is done by forming a solid pro-democracy alliance or coalition. This alliance movement must be carried out in the political, institutional and social arenas at the same time. Indonesian democracy will return to its original state and popular sovereignty can be re-established if these three elements of this nation can work together to build democracy and repress authoritarianism within the nation’s democratic body.

Keywords: democracy; rousseau; back to nature; indonesia

1. Pendahuluan

Pasca-dua puluh enam tahun berlalu, sejak dimulainya era reformasi, demokrasi di Indonesia masih belum mencapai tingkat stabil dan maksimal seperti yang diharapkan. Bahkan, disebutkan bahwa Indonesia sedang menghadapi penurunan signifikan dalam aktualisasi praktik demokrasi (Alvian, 2024). Sejak awal, demokrasi sudah tampil sebagai sistem politik yang memberikan hak yang sama kepada warga (*demos*) untuk memerintah dan menjalankan kekuasaan (Kebung, 1997). Berbeda dari monarki dan oligarki yang memberikan kekuasaan hanya kepada sekelompok orang kaya, demokrasi memberikan ruang penuh kepada rakyat untuk membuat keputusan. Demokrasi tidak memperkenankan adanya diskriminasi dalam distribusi kesempatan berpendapat dan menyatakan pendapat (P. B. Kleden, 2008). Ini beralasan mengingat roh demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kinerja para pemimpin dipantau oleh rakyat, dan semuanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat (Wattimena, 2016).

Sayangnya, demokrasi yang bergulir di negara ini, khususnya di perhelatan-perhelatan pemilu, hanya menjadikan rakyat sebagai “bilangan suara” (Mulyadi, 2019). Secara faktual, setelah masa Orde Baru berakhir, pemilu dengan spirit yang lebih demokratis diadakan kembali pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Enam kali pemilu yang telah diselenggarakan di era reformasi ini memberi gambaran tersendiri tentang praktik sosial demokrasi di Indonesia (Bolo, 2023). Rakyat diperlukan saat pemilu, bahkan dibeli dengan uang, tetapi kemudian dicampakkan ketika mereka bersuara menuntut keadilan. Demokrasi selanjutnya hanya menjadi panggung politiknya para elite negara, padahal hak-hak komunikatif rakyat terlaksana terutama dalam diskursus-diskursus informal yang dapat dilaksanakan dengan inklusif sambil mempersoalkan segala tema yang relevan (Hardiman, 2009).

Berbagai skandal, ketidaksetaraan, dan penyimpangan etika masih terjadi di mana-mana. Prinsip-prinsip Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi seringkali diabaikan. Konstitusi negara dimanipulasi, moralitas mengalami penurunan yang signifikan, dan norma-norma etika seringkali diabaikan begitu saja. Keadaban publik yang menjadi kriteria kemantapan demokrasi bangsa makin merosot telanjang belakangan ini. Pemilu 2024 menjadi episentrum soal keadaban ini. Dukungan politik kekuasaan memenangkan Prabowo-Gibran hanya dalam satu putaran. Tentang ini, *Tempo* menulis sebuah ajakan sinis-pragmatis bahwa para despot yang ingin membajak demokrasi bisa belajar dari Presiden Joko Widodo yang sukses menjadi pelakon inti dalam usaha mendesain kecurangan secara terstruktur dan sistematis pada pemilihan presiden 14 Februari 2024 (Tempo.co, 2024).

Tidak hanya presiden Jokowi, dinamika politik Indonesia menampilkan para politikus sebagai demagog-demagog tanah air yang menonjolkan ketiadaan etika dalam berpolitik. Para politikus ini memainkan peran yang apik dalam kampanye politik, retorika publik, ataupun strategi politik lainnya. Parahnya lagi, mereka memakai retorika yang memprovokasi emosi, janji-janji populis yang tidak realistis, penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak akurat, serta memanfaatkan isu-isu identitas atau perpecahan sosial untuk mendapatkan dukungan politik (F. B. Kleden, 2024). Dihadapkan dengan situasi demikian, perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi penting dan mendesak untuk dievaluasi secara terus-menerus.

Kemunduran demokrasi telah membawa dampak yang signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk hak asasi manusia, kebebasan pers, dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik (Febriandy, 2024). Oleh sebab itu, demi roda perjalanan reformasi yang sehat, bangsa Indonesia harus membangun resistensi untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang autentik. Sebagai bagian dari gerakan resistensi tersebut, penulis mengusulkan konsep pemikiran J.J. Rousseau tentang “*Back to Nature*” sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemunduran demokrasi saat ini. Rousseau percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai keselamatan adalah dengan “*Back to Nature*” atau mengembalikan diri pada keadaan awal (Bertens, 2000). Baginya, kondisi alamiah itu baik dan membahagiakan. Awalnya, manusia hidup dalam keadaan baik. Namun, dengan berjalannya waktu dan munculnya lingkungan serta masyarakat, manusia mulai terjerumus dalam berbagai bentuk kejahatan.

Di tengah kekacauan dan kemunduran demokrasi seperti ini, gagasan Rousseau tentang “*Back to Nature*” adalah salah satu jalan keluar agar manusia bisa hidup aman lagi. Dalam gagasan tersebut, kebebasan, kedaulatan rakyat dan kehendak umum sangat dijunjung tinggi. Keadaan asali bisa saja mengalami kemerosotan. Manusia lalu membutuhkan persekutuan (dalam hal ini negara) untuk melestarikan keadaan asali itu. Dan cara terbaik menurut Rousseau adalah membentuk persekutuan/negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Rousseau

sebagaimana ditandaskan Hardiman mengatakan bahwa dalam kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya, sebab dia adalah sumber kedaulatan dan dengan beradaptasi dengan kehendak umum, kepentingan realnya dipenuhi (Hardiman, 2019).

Dengan mengangkat kembali pemikiran Rousseau tentang "*Back to Nature*" yang memiliki relasi teoretis dengan kerangka sistem demokrasi, penulis berupaya menciptakan sebuah tatanan negara yang sehat dan demokratis. Lebih dari itu, menurut penulis, gagasan partikular "*Back to Nature*" ini sangat cocok untuk diaplikasikan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia perlu "*Back to Nature*", dan kondisi demokrasi bangsa Indonesia harus siap diarahkan menuju demokrasi autentik yang sesuai dengan esensinya. Untuk mendalami tema ini, penulis akan membagi tulisan ini dalam beberapa sub topik, yakni: *inti dari "Back to Nature J.J Rousseau", demokrasi Indonesia dalam gagasan "Back to Nature", dan langkah konkret dari gagasan "Back to Nature" untuk mengembalikan demokrasi dari kamunduran yang sedang dihadapi.*

2. Metode

Dalam proses penulisan guna menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menganalisis dua tema utama, yakni kondisi demokrasi Indonesia dan gagasan J.J. Rousseau tentang "*Back to Nature*". Sumber data dari penelitian kualitatif adalah penyajian kata-kata atau kalimat lisan atau tulisan yang kemudian dicermati oleh peneliti (Moeleong, 2017). Penulis akan menghimpun data-data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, artikel-artikel jurnal, berita-berita di surat kabar (cetak dan online), hasil-hasil penelitian lembaga ahli, dan juga sumber tulisan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber primer yang dipakai dalam tulisan ini adalah buku Rousseau berjudul *Discourse on Sciences and Arts*, dan laporan tentang kondisi demokrasi yang dibuat oleh *V-Dem Institute* pada tahun 2024. Secara khusus laporan tersebut mencakup berbagai indikator penilaian demokrasi seperti kebebasan berekspresi, kualitas pemilu, dan dominasi kontrol eksekutif. Untuk memperdalam penelitian ini, pembacaan penulis terhadap sumber-sumber sekunder juga dilakukan. Umumnya, sumber-sumber sekunder adalah artikel-artikel jurnal yang diterbitkan selama sepuluh tahun terakhir. Artikel-artikel ini berbicara tentang pemikiran Rousseau dan analisis terhadap situasi demokrasi bangsa. Dalam studi ini, penulis berupaya mencermati kondisi demokrasi yang diteliti secara rinci, serentak membaca jawaban atas persoalan demokrasi berdasarkan pemikiran "*Back to Nature*" dari Rousseau.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pokok Pikiran Rousseau

Jean Jacques Rousseau lahir di Jenewa pada tanggal 28 Juni 1712 dan meninggal pada 2 Juli 1778. Ia adalah seorang filsuf, penulis, dan komposer besar Abad Pencerahan. Pemikiran filosofisnya mempengaruhi Revolusi Perancis, perkembangan politik modern dan landasan pemikiran pendidikan (Aji, et al., 2023). Rousseau dikenal sebagai filsuf pemberontak intelektual karena keluasan pemikirannya. Selain itu, Rousseau juga merupakan salah satu pionir gerakan revolusioner Perancis pada akhir abad ke-18, karena ia menciptakan gerakan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu monarki absolut (Bertram, 2024).

Rousseau mengajukan konsep keadaan alamiah untuk menjelaskan keadaan asali umat manusia, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar sifat manusia dan menjelaskan kehidupan dalam masyarakat modern (Ryansyah, 2020). Keadaan asali manusia pada dasarnya adalah baik. Kebaikan itu sudah menjadi kodrat atau bagian yang tertanam dalam diri manusia. Keadaan alamiah menggambarkan suatu situasi atau kondisi di mana manusia hidup dalam kebahagiaan dan kebebasan mutlak, sehingga tidak ada kebencian yang tertanam dalam diri manusia sejak awal. Tetapi kemudian, keadaan asali itu pun cenderung merosot karena kendala yang dihadapi manusia lebih banyak daripada jumlah sumber untuk mempertahankan diri (Hardiman, 2019).

Kemerosotan keadaan asali itu muncul dari peradaban modern, lingkungan dan masyarakat sekitar itu sendiri yang telah memengaruhi manusia (Ryansyah, 2020). Menurutnya, peradaban modern yang dialami manusia hanya membawa kemunafikan, kecongkakan, dan ketidaksungguhan bagi manusia. Segala bentuk penderitaan dan kejahatan dunia sebetulnya berasal dari kehidupan bersama dalam masyarakat, dari ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sejumlah peradaban itu memburukkan kodrat manusia yang awalnya baik menuju pada suatu kekacauan dan ketidakteraturan.

Rousseau menulis sebuah artikel menarik berjudul “*Discourse on the Arts and Sciences*”. Dalam artikel itu, Rousseau menggambarkan tubuh manusia sebagai basis dari masyarakat, sedangkan pikiran hanyalah perhiasan belaka (Rousseau, 2024). Melalui tulisan ini, ia juga hendak mendeskripsikan sifat artifisial kebudayaan yang meruntuhkan kodrat alami manusia. Pikiran manusia terejawantah dalam entitas kebudayaan, seperti ilmu, seni dan sastra. Segala entitas ini lahir dari kejahatan sehingga berdampak pada tingkah laku manusia yang bertendensi pada tingkah laku yang jahat pula. Kritiknya sungguh bertolak belakang dengan gagasan pada Abad Pertengahan, di mana kemajuan teknis dipandang sebagai bagian dari kemajuan moral. Tetapi Rousseau justru memandang kemajuan teknis sebagai bagian dari kemerosotan moral karena lahir dari kejahatan.

Berhadapan dengan situasi ini, Rousseau menulis sebuah buku tentang *Du Contrat Social*. Dalam buku tersebut, sebagaimana diungkapkan Bertens, Rousseau mengusulkan sebuah susunan masyarakat yang bebas, bahagia dan manusiawi menurut asas-asas kodrat manusia. Manusia mesti hidup bebas sesuai kodratnya dan menjadi tuan atas dirinya sendiri. Rousseau menggambarkan bahwa keadaan alami juga memiliki tendensi untuk mengalami kemerosotan. Kemerosotan ini lahir dari kepemilikan pribadi yang kemudian menimbulkan ketidakadilan sosial dan lenyapnya keadaan alami manusia. Maka, persekutuan, dalam hal ini negara, menjadi salah satu alternatif urgen untuk melestarikan keadaan alami itu. Persekutuan inilah yang dibahasakan Rousseau sebagai kontrak sosial, di mana tatanan sosial dibentuk oleh sebuah kesepakatan, persetujuan atau konvensi sosial (Bertens, 2000). Persekutuan ini pun melahirkan sebuah lembaga moral kolektif, yakni negara dalam artian pasif dan kedaulatan dalam artian aktif.

Motif utama dari kontrak sosial ini adalah mempertahankan kebebasan alami manusia. Dalam lembaga negara ini, kehendak individu tunduk pada kehendak umum yang dianggap lebih mencerminkan kepentingan real daripada kehendak individu. Dan Rousseau sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Menurutnya, kedaulatan adalah bentuk pelaksanaan kehendak umum. Artinya, melalui kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya dan dengan beradaptasi dengan kehendak umum, kebutuhan realnya dapat terpenuhi secara maksimal. Dengan konsep ini, Rousseau dianggap sebagai pendukung demokrasi yang paling penting, meskipun bertendensi mengarah pada totalitarisme.

b. Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam empat periode penting, yakni: *Pertama*, Demokrasi Parlementer periode 1945-1959 (Seri Tempo, 2019). Periode ini dikenal dengan sistem Demokrasi Parlementer dan mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. UUDS 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen, di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya. Parlemen memiliki kedudukan yang penting sehingga berdampak pula pada kedudukan partai politik yang semakin kuat. Namun, demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena sistem koalisi dan fragmentasi partai politik yang kerap kali membuat kabinet jatuh-bangun. Kuatnya pengaruh parlemen dan kabinet yang silih berganti dapat menghambat perkembangan ekonomi dan politik. Terlepas dari berbagai kemelut, sistem demokrasi parlementer menyisakan salah satu peristiwa penting pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap, yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum pertama yang berjalan dengan tingkat partisipasi tinggi (lebih dari 39 juta orang).

Kedua, Demokrasi Terpimpin periode 1959-1965. Demokrasi terpimpin adalah buah dari konsepsi Soekarno yang digulirkan pada 21 Februari 1957 terutama setelah bersitegang dengan Bung Hatta. Ciri utama dari periode ini ialah dominasi peran presiden, terbatasnya partai politik dan berkembangnya pengaruh PKI dan ABRI dalam ranah politik (Alam, 2003). Masa ini dimulai ketika Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, yang dianggap akan mampu mengatasi kemacetan politik. Namun, terjadi begitu banyak penyimpangan pada masa itu, seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun (MPRS No. III/1963), intervensi presiden dalam ranah yudikatif (Undang-Undang No. 19/1964), dan lainnya. Masa ini tidak menunjukkan demokrasi yang autentik, karena banyak terjadi kesalahan kaprah yang menjurus pada pemerintahan otoriter. Lahirnya gerakan 30 September PKI pun mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno.

Ketiga, Demokrasi Pancasila 1965-1998 (Purnamawati, 2020). Periode ini dimulai setelah gagalnya G30SPKI. Motivasi dan intensi utama masa ini ialah niat baik untuk mengembalikan dan memurnikan kembali pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS pun menjadi landasan formal

yang solid. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, sehingga dinamakan Demokrasi Pancasila. Namun, Demokrasi Pancasila sebatas dijadikan lambang dan retorika belaka, tanpa adanya implementasi yang seimbang.

Keempat, Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang). Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Pada masa ini, ruang untuk berdemokrasi semakin lebar dan luas, seperti kebebasan pers dalam ruang publik yang semakin terbuka, keterlibatan masyarakat dalam politik, pemberlakuan sistem multipartai, kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul sesuai aspirasi politiknya, rekrutmen jabatan politik yang transparan dan sebagainya (Ida, 2014). Periode reformasi memperlihatkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Namun, perjalanan demokrasi sejak masa reformasi terus mengalami pasang-surut bahkan kemunduran yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam data yang disajikan oleh lembaga *The Economist Intelligence Unit* (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia dan *Democracy Report*, di mana demokrasi Indonesia mengalami pengurangan yang signifikan, yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, tetapi juga fungsi pemerintahan (Purnamawati, 2020). Persoalan utamanya terletak pada bagaimana demokrasi mewujudkan diri dalam berbagai aspek kehidupan dan menata relasi antara negara atau pemerintah dengan rakyat, ataupun sebaliknya. Posisi keseimbangan (*equilibrium position*) dan saling melakukan pengawasan (*check and balance*) menjadi dua hal penting yang mesti selalu hidup dalam berdemokrasi (Puslit IAIN SYARIF Hidayatullah, 2000).

Demokrasi Indonesia masih disebut cacat (*flawed democracy*). Kecacatan ini berdampak pada ranking bangsa Indonesia dalam dunia internasional yang kini menurun dari 52 menjadi 54. Bahkan di Kawasan Asia Tenggara, kualitas demokrasi Indonesia kalah dari Malaysia, Timor Leste dan Filipina (Javier, 2023). Artinya, bangsa Indonesia sedang berada dalam fase kemunduran demokrasi yang signifikan. Apabila gagal dalam membendung episode autokratisasi, bangsa Indonesia akan tergelincir dalam kategori yang lebih buruk, yakni *electoral autocracy*, yang berakibat lanjut menjadi negara *closed autocracy* (Alvian, 2024).

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia, yaitu kebebasan berekspresi, kualitas pemilu, dan dominasi kontrol eksekutif. Dalam kaitan dengan kebebasan berekspresi, *V-Dem Institute* melaporkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah berperan melemahkan dasar kebebasan berekspresi melalui banyak undang-undang yang cenderung membatasi aspirasi dan pergerakan perubahan dari masyarakat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara sepihak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan beberapa tokoh yang dianggap menghina atau menyebarkan informasi yang merugikan pihak penguasa merupakan satu contoh pemasungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia (*V-Dem Institute*, 2024).

Berkaitan dengan kualitas pemilu, *V-Dem Institute* melaporkan adanya manipulasi pada pemungutan suara, intimidasi pemilih, dan intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam proses pemilu telah mempengaruhi pemilu Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang buruk, hingga penghitungan suara yang meragukan adalah indikator-indikator utama rendahnya kualitas pemilu di Indonesia. Hal ini patut disayangkan sebab pemilu yang sebenarnya mampu memperkuat demokrasi, malah menjadi arena permainan yang menggerus cita-cita demokrasi bangsa. Degradasi kualitas pemilu ini terbukti jelas pada Pemilu 2024 lalu. Meningkatnya dominasi kontrol eksekutif adalah faktor ketiga yang sangat berpengaruh terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Kekuatan otoritas eksekutif di Indonesia yang sangat tersentralisasi pada presiden dan lembaga-lembaga yang berada di bawah kendalinya, semakin unjuk diri. Pemerintah berupaya untuk menundukkan dan mendiskreditkan lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, dan komisi-komisi independen (*V-Dem Institute*, 2024).

c. Back to Nature: Konstruksi Koalisi Pro-Demokrasi

Pemikiran Rousseau didasarkan pada perspektifnya tentang kondisi awal manusia, yang disebutnya sebagai manusia alami (Rahmadi dan Rusma Yulidawati, 2021). Manusia alami hidup sesuai dengan kodrat alamiahnya, dengan kebebasan mutlak dan identitas yang asli. Rousseau percaya bahwa keadaan alamiah manusia adalah keadaan yang baik dan murni, namun telah dirusak oleh peradaban dan masyarakat. Gagasan "*Back to Nature*" adalah sebuah kritik Rousseau terhadap peradaban modern yang dianggapnya telah merusak kehidupan manusia dan membuatnya jauh dari keadaan alamiah. Atas dasar itu, ia menyerukan agar manusia perlu kembali ke keadaan alamiah, di mana manusia dapat hidup secara sederhana, alami, dan bebas dari korupsi peradaban.

Bagi Rousseau, "*Back to Nature*" menjadi solusi terbaik untuk melindungi manusia dari berbagai kejahatan semacam itu. Namun, hal ini tidak berarti bahwa manusia harus kembali ke keadaan primitif yang sangat sederhana dan tertinggal, tetapi bagaimana manusia dapat mengembalikan sifat-sifat alamiahnya dengan penyesuaian yang tepat (Copleston, 2023). Dalam kondisi alamiah ini, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kebebasan yang sesungguhnya. Namun, terdapat beberapa pesimisme yang menyatakan bahwa keadaan alamiah manusia tidaklah seideal yang digambarkan Rousseau. Konsep Rousseau juga memicu kontroversi tentang peradaban dan kemajuan, dengan beberapa orang menganggap bahwa peradaban adalah kemajuan yang tidak dapat dihindari.

Betapapun demikian, inti konsep "*Back to Nature*" merupakan sebuah gagasan filosofis yang penting dan berpengaruh. Di tengah autokratisasi atau kemunduran demokrasi, bangsa Indonesia memerlukan sebuah resistensi dan resiliensi untuk mengembalikan demokrasi pada keautentikannya atau keasliannya. Bangsa Indonesia perlu mencegah kemunduran demokrasi lebih lanjut. Ada dua alasan urgen mengapa resistensi harus segera dilakukan, yakni: *pertama*, momen autokratisasi terjadi dalam bentuk pergeseran *electoral democracy* menuju *electoral autocracy*. Kondisi semacam ini memberikan kesempatan emas bagi elite autokratik untuk mengeksploitasi institusi demokrasi dari dalam. *Kedua*, kekuatan elite autokratik yang semakin kuat akan mempersempit ruang resistensi negara. Jika kemelut semacam ini dibiarkan begitu saja, maka demokrasi Indonesia akan menjadi lebih buruk. "*Back to nature*" menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mengatasi kemunduran demokrasi.

Dalam hal ini, gagasan "*Back to Nature*" hendak membawa kembali marwah demokrasi yang sesungguhnya atau yang sesuai dengan prinsip asalnya. Kedaulatan rakyat bersifat mutlak sehingga harus dijunjung tinggi (Copleston, 2023). Untuk kembali pada demokrasi yang sesungguhnya serta membatasi kerusakan demokrasi selanjutnya, maka pembentuk koalisi pro-demokrasi menjadi alternatif terbaik yang mesti dilakukan. Ada tiga aktor penting yang mesti membentuk koalisi pro-demokrasi dan membatasi autokratisasi, yakni: aktor politik (partai politik), aktor institusional (aparatur negara), dan aktor sosial (Tomini, et al., 2023).

Pertama, aktor-aktor institusional adalah individu yang menempati posisi di berbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang bertanggung jawab untuk menjaga prinsip akuntabilitas di antara cabang kekuasaan eksekutif. Mereka memiliki wewenang dan kemampuan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga menolak segala upaya untuk konsolidasi kekuasaan secara autokratis. Contoh dari aktor-aktor ini ialah Hakim Konstitusi atau Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Undang-Undang atau Keputusan Pemerintah yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi, anggota badan independen seperti otoritas antikorupsi yang memiliki wewenang untuk menentang keputusan eksekutif yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, serta anggota otoritas pemilihan umum independen yang bertugas mengawasi proses pemilihan umum untuk memastikan transparansi dan keadilan, serta menolak tekanan dari eksekutif untuk melakukan manipulasi pemilihan.

Kedua, para pelaku politik. Pelaku politik di sini mencakup pemimpin dan partai politik yang memiliki kemampuan untuk menentang proses autokratisasi dalam konteks demokrasi, baik di dalam maupun di luar struktur lembaga negara. Biasanya, peran ini dilakukan oleh partai oposisi, baik melalui konteks kompetisi pemilihan umum maupun dalam perannya sebagai koordinator dan representasi dari berbagai kelompok dan kepentingan sosial. Representasi oposisi diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Wahyu, 2004).

Ketiga, kelompok penentang sosial, yang sering disebut sebagai *social resisters*, adalah aktor-aktor yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir perlawanan terhadap proses autokratisasi pada tingkat akar rumput (*grassroot*). Kelompok ini meliputi organisasi masyarakat sipil, gerakan sosial, lembaga keagamaan, gerakan mahasiswa, serikat buruh, serta individu dan kelompok dari berbagai bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Mobilisasi *social resisters* untuk demokrasi sangat penting untuk perkembangan demokratisasi bangsa. Artinya, mobilisasi massa dapat memainkan peran penting dalam menghentikan autokratisasi yang terjadi. Dalam hal ini, tekanan politik dari bawah dapat menciptakan peluang bagi oposisi demokratis untuk memenangkan pemilu dan untuk mencegah partai yang berkuasa melaksanakan reformasi lebih lanjut (Wiebrecht, et al., 2023).

Gerakan dari ketiga aktor ini sangat dipengaruhi oleh rezim yang ada. Sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, aktor institusional, politik, dan sosial bertanggung jawab untuk memberikan tekanan kepada elit otoriter agar agenda mereka tidak tercapai. Namun,

tantangannya adalah ketika rezim otoriter berhasil memanipulasi ranah institusional, politik, dan sosial, melalui berbagai manuver politik. Ketika rezim otoriter berhasil memengaruhi ketiga aktor ini, maka kekuasaannya akan semakin kuat dan demokrasi akan semakin terkikis. Namun, jika rezim tidak berhasil mengendalikan para aktor tersebut, maka mereka tidak akan dapat mengkonsolidasikan kekuasaannya (Bajpai, Rochana and Yasser Kureshi, 2022). Selain manuver politik rezim, masalah kepercayaan di antara para aktor juga menjadi hambatan utama. Kurangnya kepercayaan di antara para aktor membuat mereka rentan terhadap pengaruh rezim dan kemungkinan untuk mengkhianati.

Dengan demikian, "*Back to Nature*" dalam konteks pembentukan koalisi atau aliansi pro-demokrasi menjadi opsi yang harus diperhitungkan oleh bangsa Indonesia. Tentu saja, perlawanan terhadap otoritarianisme membutuhkan kerja sama dan koordinasi di antara semua pihak yang terlibat. Namun demikian, membangun jalinan kerja sama di antara para aktor bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, jika setiap aktor bertindak secara terpisah tanpa berupaya untuk bekerja sama, maka demokrasi di Indonesia akan terus mengalami kemunduran. Ketiga elemen yang telah disebutkan di atas dapat berhasil apabila mendapat dukungan penuh berupa apresiasi dan kritik konstruktif. Untuk itu, orang muda sebagai generasi penerus bangsa juga harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan politik yang memadai (Amelta, et al., 2024). Sebagai estafet pemerintahan di masa mendatang, generasi muda yang melek politik akan memiliki sikap kesadaran demokrasi yang baik dan kemampuan kritis dalam menanggapi tantangan ke depannya. Dengan cara demikian, demokrasi di Indonesia bisa berkembang ke arah yang lebih positif.

4. Simpulan dan Saran

Dalam sepuluh tahun terakhir, kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Untuk mengembalikan marwah demokrasi yang autentik, bangsa Indonesia perlu menghidupi spirit *Back to Nature* yang digagas Rousseau. Gagasan "*Back to Nature*" adalah kritik filosofis Rousseau terhadap peradaban modern yang dianggapnya telah merusak kehidupan manusia dan membuatnya jauh dari keadaan alamiah. Manusia perlu kembali ke keadaan alamiah, di mana manusia dapat hidup secara sederhana, alami, dan bebas dari korupsi peradaban. Tujuan dari konsep "*Back to Nature*" yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai pedoman dalam mengatasi kemunduran demokrasi bangsa, sekaligus mengembalikan demokrasi bangsa Indonesia ke demokrasi alamiah di mana setiap masyarakat dapat hidup secara sederhana, bebas berekspresi, menghargai perbedaan, dan jauh dari kejahatan. Secara konkret, upaya tersebut dapat ditempuh dengan membentuk sebuah persekutuan untuk melestarikan keadaan demokrasi yang sesungguhnya, dengan membentuk koalisi pro-demokrasi yang solid. Gerakan resistensi dan resiliensi perlu dilakukan dalam arena politik, institusi dan sosial. Para aktor dari ketiga elemen ini mesti membangun sebuah jalinan kerjasama yang baik untuk merepresi otoritarianisme dalam tubuh demokrasi bangsa Indonesia. Ketika para aktor mampu membangun kerja sama yang baik dalam aliansi atau koalisi pro-demokrasi, maka rezim autokratik tidak akan bisa memperluas ranah kekuasaannya. Dengan begitu, demokrasi Indonesia akan kembali pada keadaan aslinya dan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan kembali.

5. Daftar Pustaka

- Aji, S.M.W., Rakhmawati, Y., & Sutinah, F. A. G. R. (2023). Jean Jacques Rousseau: Kehidupan, Pemikiran Pendidikan, dan Tinjauan Pendidikan di Indonesia. *Briliant Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(1), 38–47. <https://doi.org/DOI:10.28926/briliant.v8i1.930>
- Alam, W. T. (2003). *Demi Bangsaku Pertentangan Bung Karno Vs Bung Hatta*. Gramedia Pustaka Utama.
- Alvian, R. A. (2024). Demokrasi yang Bertahan. *Koran Tempo (Kolom)*. <https://www.tempo.co/kolom/upaya-mencegah-kemunduran-demokrasi-408460>
- Amelta, C., Putra, E., Mayang Agustina, M, M., Pramana, F.I., & Vicko Ardiansyah, V. H. A. H. (2024). Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusinya di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Bajpai, R., & Kureshi, Y. (2022). Mechanisms of Democratic Authoritarianism: De-Centring the

- Executive in South Asia and Beyond. *Democratization Journal*, 29(8), 1382.
- Bertens, K. (2000). *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*. Kanisius.
- Bertram, C. (2024). Jean Jacques Rousseau. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 202).
- Bolo, A. D. (2023). Masyarakat Jejaring (Network Society) Sebuah Upaya Penguatan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 3(1), 42.
- Copleston, F. (2023). *Filsafat Rousseau*. Basabasi.
- Febriandy, R. K. dan U. W. (2024). Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of Democracy (V-DEM) Institute 2024. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 7(2), 1043. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.12392>
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2019). *Pemikiran Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*. PT Kanisius.
- Ida, L. (2014). Election and Political Evil Ambition in Indonesia's Reformasi Era. *International Journal of Politics and Good Governance*, 5(5.4 Quarter IV), 1–24.
- Javier, F. (2023). Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan. *Tempo.Co*. <https://data.tempo.co/data/1642/indeks-demokrasi-indonesia-2022-%0Astagnan>
- Kebung, K. (1997). *Michel Foucault: Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*. Penerbit Obor.
- Kleden, F. B. (2024). Politik Demagogi, Matinya Kebenaran, dan Upaya Penguatan Demokrasi. *Jurnal Akademika*, 23(2), 1.
- Kleden, P. B. (2008). Pemilu 2009 dan Upaya Demokratisasi. *Jurnal Ledalero*, 7(2), 101.
- Moeleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. (2019). *Falsifikasi Demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purnamawati, E. (2020). *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. 18(2), 254.
- Puslit IAIN SYARIF Hidayatullah. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. IAIN Jakarta Press.
- Rahmadi & Yulidawati, R. (2021). Serpih Pemikiran Jean Jacques Rousseau Terhadap Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 9(2), 20.
- Rousseau, J.-J. (2024). *Discourse on Sciences and Arts*. Livraria Press.
- Ryansyah, A. A. P. (2020). Demokrasi Kita dalam Sudut Pandangan Rousseau. *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 3. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon>.
- Seri Tempo. (2019). *Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tempo.co. (2024). Kekuasaan: Kunci Prabowo Subianto Menang Pemilu Satu Putaran. *Tempo.Co (Kolom)*, 14. <https://www.tempo.co/kolom/prabowo-subianto-pemilu-satu-putaran-817210>.
- Tomini, Lukas, Suzan Gibril, dan V. B. (2023). Standing Up Against Autocratization Across Political Regimes: A Comparative Analysis of Resistance Actors and Strategies. *Democratization Journal*, 30(1), 124. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2115480>.
- V-Dem Institute. (2024). *Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot*.
- Wahyu, Y. (2004). Pemilu 2024 dan Pertaruhan Demokrasi di Indonesia. *Kompas (Opini)*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/pemilu-2024-dan-pertaruhan-demokrasi-indonesia>
- Wattimena, R. A. A. (2016). *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Penerbit Kanisius.

Wiebrecht, F., Sato, Y., Nord, M., Lundstedt, M., Angiolillo, F., & Lindberg, S. I. (2023). State of The World 2022: Defiance in The Face of Autocratization. *Democratization Journal*, 30(5), 769–793. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2199452>.